

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu :

1. BPK memiliki peran unik sebagai lembaga tunggal yang bertanggung jawab dalam Melakukan perhitungan dan penetapan kerugian keuangan negara, di samping memiliki kewenangan lain sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, BPKP memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan adanya kerugian tersebut. Namun, BPKP dapat menentukan apakah terjadi kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh mereka.
2. Terkait implementasi peraturan perundang-undangan masih belum diterapkan dengan baik, karena sampai sekarang masih banyak kasus-kasus yang dimana hasil laporan yang diambil oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan adalah BPKP, walaupun sebenarnya hanya majelis hakim yang berwenang memutuskan, akan tetapi pada dasarnya hasil laporan BPK lah yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan.

Untuk mencapai hasil pemeriksaan yang efektif dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan. BPK harus mengumpulkan informasi yang seluas-luasnya dari bentuk hasil partisipasi masyarakat.

B. Saran

Adapun saran-saran oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kewenangan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi harus dilakukan oleh BPK. Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada pasal 23E dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Terkait implementasi terhadap penerapan peraturan perundang-undangan harus lebih bisa meningkatkan komunikasi dengan Lembaga hukum. BPK RI harus meningkatkan jumlah pemeriksa atau menambah personal *auditor*. Selain menambah jumlah *auditor* BPK juga harus menyiapkan kualitas *auditor*, yaitu: kompetensi dari *auditor*, metodologi pemeriksa, pemeriksaan berbasis risiko dan melakukan perencanaan anggaran yang terencana.

